

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arizona, Yance, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi S., 1994, *Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bamba, John, “Recognition “In Kind”: Indonesian Indigenous Peoples and State Legislation”, dalam Christian Erni, *The Concept of Indigenous Peoples in Asia: A Resource Book*, 2008, IWGIA, Denmark.
- Van Vollenhoven, C., 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Terjemahan Soewargono, Yogyakarta: STPN Press
- Hadjon, Philipus M., et. al., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Holleman (Ed.), J. F., 1981, *Van Vollenhoven in Indonesian Adat Law*, KITLV, Leiden.
- Ismi, Hayatul, 2017, *Tinjauan Hukum atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, Pekanbaru: Forum Kerakyatan
- Koesno, M., 1992, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum (Bagian I)*, Mandar Maju, Bandung
- Marbun, S. F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Murad, Rusmadi, “Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah”, Makalah dalam Seminar Nasional “Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya”, Jakarta, 20 Agustus 2003, hlm. 6-8, dalam Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Saragih, Djaren, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Transito
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta
- Scholten, Paul, “Verzamelde Geschriften”, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

- Sembiring, Djulius, 2018, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta
- Simanjuntak, Enrico 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Simarmata, Rikardo, et. al., *Re-Visit Konsep dan Upaya Pengadministrasaaian Tanah Ulayat*, dalam Nurhasan Ismail et. al., *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S. W. Sumardjono*, 2023, Yogyakarta: Genta Publishing
- Simarmata, Rikardo., Steni, Bernadius, 2017, *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, Jawa Barat: The Samdhana Institute
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Soepomo, 1983, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Soesangobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Sleman.
- Sumardjono, Maria S. W., “Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat”, dalam Mohamad Sohibuddin, et. al., 2019, *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*, STPN Press, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S. W., 2018, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ter Haar, B., 1962, *Adat Law in Indonesia*, Jakarta: Bhratara
- Utama, Tody S. J., Dari Pengakuan Masyarakat Adat menuju Pemenuhan Hak Tenurial: Masih “Menunggu Godot”, dalam N. Suryawati, ed., 2020, Menuju Legislasi Berkualitas: Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Unversitas Katolik Darma Cendekia, Surabaya, hlm. 112-144
- Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Makassar.
- Van Vollenhoven, C. 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta
- Warman, Kurnia, “Hutan Adat di “Persimpangan Jalan”: Kedudukan hutan adat di Sumatera Barat pada era desentralisasi”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit HuMa, van Vollenhoven Institute dan KITLV
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal

Abdullah M., Ali, 2017, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amanademen*, Kencana, Jakarta, hlm. 15, dalam A. D. Lumbanraja, “Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, *Administrative Law & Governance Journal Vol. 2, Issue 4*, 2019.

Aditya, Z. F., Yulistyaputri, Rizkisyabana, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding 8(1)*, 2019, hlm. 38

Citrawan, F. A., “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 586-602

Diala, Anthony C. “The Concept of Living Customary Law”, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49:2, 2017, hlm. 143-165

Fitzpatrick, Daniel, ““Best Practice” Options for the Legal Recognition of Customary Tenure”, *Development and Change*, 36, 2005, hlm. 456

Hakim, A. C. L., Pradhani, S. I., “Penerapan Pendekatan formalisme hukum dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 2021.

Heriyanto, Bambang, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Paradigma UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Pakuan Law Review, Vol. IV, No. 1*, 2018

Hoekema, Andre J., “A new beginning of law among indigenous peoples. Observation by legal anthropologist” dalam Simarmata, 2018, *Op.cit.*

Irianto, Sulistyowati, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal” dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 309

Lumbanraja, A. Doramia, “Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, *Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, Issue 4*, 2019, hlm. 677-685

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Moniaga, Sandra “From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey”, dalam Jamie S. Davidson, David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*, 2007, Oxon: Routledge, hlm 275-294

- Pradhani, S. I., "Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 2020
- Pradhani, S. I., Sari, A. C. F., "Penerapan Pendekatan Positivistik dalam Penelitian Hukum Adat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 2022, hlm. 235-247
- Prasetyo, Agung Basuki, "Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)", *MMH Jilid 39(2)*, 2010
- Putzel, Louis, et. al., "Formalization as Development in Land and Natural Resource Policy", *Society & Natural Resources*, 28(5), 2015, hlm. 457
- Richardson, Benjamin J., "Protecting Indigenous Peoples Through Socially REsponsible Investment", *Indigenous Law Journal*, Vol. 6: 1, 2007, hlm. 5
- Riza, Dola, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018
- Sari, A. C. F., "Hak dan Akses Tenurial Masyarakat Hukum Adat Bengkunt dalam Pemanfaatan Hutan di Pesisir Barat, Lampung", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1), 2020
- Sari, A. C. F., et. al., "Pelepasan Hak Adat atas Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan", *Dictum Edisi 14*, 2021, hlm. 52-70
- Simanjuntak, Enrico, "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Bhumi Vol. 3 No. 2*, 2017, hlm. 173
- Simarmata, Rikardo, "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat", *Mimbar Hukum*, 30(3), 2018, hlm. 466
- Simarmata, Rikardo, "The Enforceability of Formalized Customary Land Rights in Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), 2019, hlm. 299–313
- Subekti, 2013, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sugiharto, Hari., Abrianto, B. O., "Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2018
- Sunario, "Masalah Kedudukan "Pribumi" dalam Pembangunan" dalam *Indonesia Kini Dan Esok: Himpunan Ceramah Dan Prasaran-Prasaran Dalam Musyawarah Membina Jiwa Dan Nilai-Nilai 1945*, Jakarta: Lembaga Pembina Jiwa 1945, 1974, dan Hartono, 1979, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum*

*Antar Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, dalam Sandra Moniaga, *Op.cit.*, hlm. 277

Taylor, Charles, “The Politics of Recognition”, *Multiculturalism: Expanded Paperback Edition*, Editor: Amy Gutmann, Princeton: Princeton University Press, 1995, pp. 25-74

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, dikutip dari N. K. D. N. I. Weda, et. al., “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021

Wahyunadi, Yodi Martono, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 1, 2016, Disertasi, Jakarta, Universitas Trisakti

Wignjosuebrotto, Soetandyo, “Ragam-ragam Penelitian Hukum”, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, oleh Editor: Sulistyowati Irianto & Sidharta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 128

Wignyodipuroe, Soerojo, “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”, Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung, 1968, hlm. 199 dalam Djulius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, 2018, hlm. 16

### Hasil Penelitian

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada: 9 Juli 2023

Dani, Umar, *PTUN dan Kebenaran Formal Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*, diakses melalui [https://www.ptun-palembang.go.id/upload\\_data/PTUN%20dan%20Kebenaran%20Formal.pdf](https://www.ptun-palembang.go.id/upload_data/PTUN%20dan%20Kebenaran%20Formal.pdf)

Elpah, Dani, et. al., 2014, Titik Singgung Kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2014

Fanny, R. D. G., 2021, Penerapan Pendekatan Adat Positivistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Tambang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Simarmata, Rikardo, 2016, *Penjelasan konsep-Konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat*, Bab II Naskah Akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, hlm. 4

Wahyunadi, Yodi Martono, "Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara" diakses dari <https://ptun-jakarta.go.id/wp->

Warman, Kurnia, 2016, "Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat", hlm. 5, diakses pada [https://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284](https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden No. 52 tahun 1991 dan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1991 tentang Penerapan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### **Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Putusan No. 04/G/2014/PTUN-PLG

Putusan No. 05/G/2015/PTUN-PDG

Putusan No. 18/G/2015/PTUN.BJM

Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.BB

Putusan No. 20/G/2017/PTUN.PDG  
Putusan No. 22/G/2015/PTUN.KDI  
Putusan No. 220/G/2019/PTUN-MDN  
Putusan No. 244 /G/2019/PTUN.Mdn  
Putusan No. 38/Pdt/2014/PT.Sultra  
Putusan No. 50/G/2018/PTUN.PBR  
Putusan No. 24/G/2020/PTUN.JPR  
Putusan No. 20/G/2017/PTUN.PDG  
Putusan No. 10/G/2020/PTUN.KPG  
Putusan No. 47/G/2019/PTUN.ABN  
Putusan No. 50/G/2018/PTUN.PBR  
Putusan No. 244/G/2019/PTUN.MDN  
Putusan No. 220/G/2019/PTUN-MDN  
Putusan No. 16/G/2020/PTUN.PBR  
Putusan No. 9/G/2020/PTUN.PDG